

## **BAB I**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Demokrasi merupakan sebuah tema yang selalu menarik untuk dibahas. Adanya proses demokratisasi menjadikan demokrasi menjadi sebuah paham yang berkembang pesat di masyarakat. Dianggap sebagai salah satu ideologi yang bisa dikatakan sempurna, demokrasi diyakini dapat mengubah keadaan suatu negara. Demokrasi banyak diminati masyarakat karena kedaulatan berada di tangan rakyat bukan di tangan pemerintah. Sehingga banyak masyarakat menganggap bahwa demokrasi menjadi juru kunci dalam penyelesaian konflik.

Demokrasi dalam pendefinisian dapat diartikan sebagai politik modern. Robert A. Dahl mendeskripsikan demokrasi dalam 5 kriteria, kriteria tersebut yaitu : (1) terdapat kesamaan untuk hak pilih terhadap penentuan sebuah keputusan bersama yang sifatnya akan mengikat; (2) adanya partisipasi yang efektif, dalam hal ini berarti kesempatan yang seimbang atau sama antara semua warga dalam satu negara untuk proses pembuatan suatu keputusan yang bersifat kolektif; (3) terdapat dekripsi tentang pembenaran, dalam artian setiap warga negara berhak memberikan komentar, pandangan, dan penilaian terhadap jalannya perpolitikan serta pemerintahan yang dapat dipikir secara logis; (4) terdapat otoritas terhadap agenda politik, yakni pemberian sebuah otoritas yang bersifat eksklusif terhadap warga negara yang diperuntukan untuk dapat menentukan keputusan mana yang harus dan tidak harus ditetapkan oleh pemerintahan yang berkuasa, dalam hal ini juga termasuk mewakilkan kekuasaan tersebut kepada lembaga atau orang lain yang dipercaya untuk mewakili masyarakat; (5) jangkauan atau cakupan, yakni termasuknya semua warga negara yang dewasa dalam kaitannya dalam hukum. Dapat dilihat, Dahl sangat mementingkan keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan dan jalannya perpolitikan serta pemerintahan dalam sebuah negara(Dahl, 1985).

Namun, negara-negara Islam belum sepenuhnya paham terhadap demokrasi dan pelaksanaan demokrasi. Berbagai tanda tanya menjadikan negara- negara Islam pada gelombang demokrasi ketiga belum sepenuhnya meyakini bahwa demokrasi merupakan suatu hal yang akan mengubah keadaan negaranya. Negara-negara Islam pada umumnya menganut politik otoriter dalam negaranya. Hal tersebut membuat masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesejahteraan masyarakatnya sangat minim. Masyarakatnya yang terlalu tenggelam ke dalam tradisi- tradisi politik tradisional dan juga feodal atau kerajaan. Sistem

politiknya tersebut yang menyebabkan negara- negara Islam pada gelombang demokrasi ketiga tidak tertarik dengan konsep demokrasi yang dirasa akan mengotori tradisinya. Hanya ada satu negara Islam yang melakukan demokratisasi pada saat demokratisasi gelombang ketiga, negara itu ialah Turki.

Dalam perjalanan demokrasinya, Turki tentunya mengalami banyak kesulitan. Kemajuan yang menjadi angan- angan Turki ternyata tidak semudah itu didapatkan. Dapat dikatakan, sejak pemilihan umum di Turki pada tahun 1950, dimana sebuah partai yang telah berkuasa selama puluhan tahun menikmati sebuah monopoli kekuasaan. Partai tersebut membiarkan dirinya kalah dalam pemilu dan seolah menyerahkan kuasanya untuk rakyat. Hal tersebut telah terjadi dalam beberapa dekade yang justru menodai kepercayaan rakyat. Para orang Turki menyebutnya dengan “intervensi militer”. Turki telah bergerak maju-mundur dalam pelaksanaan demokrasinya hingga Turki pun telah berhasil lulus ujian demokrasi, bukan hanya sekali, namun beberapa kali.

Di Turki, pengertian tentang demokrasi hanya diakui dengan berbagai batasan dan dilakukan secara formal. Demokrasi tidak menyentuh berbagai pertimbangan yang berhubungan dengan penghormatan hak sipil masyarakat dan juga kaum minoritas. Namun dalam pelaksanaannya, demokrasi di Turki berhasil memecahkan hal yang dianggap ambigu dan juga terstruktur. Inilah yang membuat masyarakat Turki semakin yakin dengan demokrasi. Kebebasan terhadap menjalani kehidupan sebagai warga negara yang memenuhi kesejahteraan menjadi sebuah alasan masyarakat Turki. (Bernard Lewis, 1994)

Amerika Serikat membawa *Peace Democratic Theory* sebagai salah satu politik luar negerinya yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasionalnya itu tidak lain adalah untuk memajukan negaranya sendiri. Dengan dalih demi kebaikan seluruh negara di dunia, Amerika membawa kepentingan nasionalnya ini menjadi sebuah politik luar negeri. Politik luar negerinya itu kemudian pelan-pelan membawa sebagian besar negara di dunia menjunjung paham demokrasi. Hal tersebut sejalan dengan nama politik luar negerinya yaitu *Peace Democratic Theory*.

Proses demokratisasi Negara Islam banyak menuai hambatan. Hambatan tersebut bukan berasal dari masyarakat sipil, melainkan berasal dari para pemimpin negara tersebut. Hal yang ditakutkan oleh para penguasa adalah adanya transisi pemindahan kekuasaan yang tadinya berada di tangan penguasa menjadi berada di tangan rakyat. Hanya sedikit Negara muslim yang berhasil menggunakan demokrasi sebagai ideologinya walaupun sepenuhnya belum menjadi Negara demokrasi yang aman dan stabil. Diantara ini Negara-negara Islam yang sudah menganut paham demokrasi adalah Lebanon, Mali, Yordania, Kyrgystan,

Yordania, Bangladesh, Albania, Pakistan dan Turki. Penolakan terhadap demokrasi juga terjadi di beberapa Negara seperti Brunei, Arab Saudi, Suriah, Turmenistan, Oman, dan Mesir.(Andiko, 2017)

Terdapat sesuatu yang mana terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam beberapa kasus demokratisasi negara- negara Islam, rakyat seringkali menjadi korban keotoriteran pemerintahan yang berkuasa. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah konflik yang bermula dari kekecewaan besar rakyat. Rakyat perlahan- lahan mulai memberontak dan melihat sebuah cahaya perdamaian ketika demokrasi diperkenalkan. Demokrasi yang dibawa oleh Amerika Serikat melalui *Peace Democratic Theory* berhasil menarik perhatian rakyat yang sudah sangat tersiksa dengan pemerintahan yang otoriter. Demokrasi bak oasis di tengah padang pasir tandus nan panas.

Ketika negara- negara Islam mulai melakukan demokratisasi dengan doktrin *Peace Democratic Theory*, sangatlah jelas antusias untuk membentuk pemerintahan baru yang lebih pro terhadap rakyat. Terdapat kekeliruan ketika negara- negara ini melakukan demokratisasi. Dalam proses masuknya demokrasi ke dalam negaranya, rakyat menelan mentah apa yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi yang mereka dapatkan seharusnya diadaptasi dengan situasi yang berada di negaranya. Sehingga dalam proses demokratisasi yang mereka dapatkan hanyalah kerugian dan juga konflik berkepanjangan. Janji *Peace Democratic* yang akan membuat negaranya lebih makmur dan sejahtera juga akan mendapat banya sekutu yang mana akan membantu mereka dikala susah ternyata hanya angan saja. Kegagalan demokratisasi menjadi suatu yang mengerikan dan membawa kesukaran dalam kehidupan bersosial rakyat tersebut.

Kebijakan luar negeri suatu Negara bergantung pada kepentingan Negara itu sendiri. Begitu pula dengan Amerika Serikat yang memiliki sedikitnya tiga kepentingan di Timur Tengah. Menurut Bowman (2008:78), kepentingan Amerika yang *pertama* adalah mengamankan dan tidak adanya rintangan aliran minyak yang mengalir dari kawasan teluk Persia ke Amerika Serikat serta Negara- Negara industry lainnya, kepentingan ini merupakan kepentingan jangka panjang. Untuk mengamanan kepentingan tersebut, maka Negara- Negara Barat perlu menjaga cadangan minyak dari serangan teroris atau gangguan dari Negara musuh. *Kedua*, kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah adalah memastikan tidak adanya aktor Negara ataupun non- Negara yang memproduksi, memperoleh atau menggunakan senjata pemusnah massal (*Weapon of Mass Destruction*) (Bowman, 2008: 79). Negara yang menjadi ancaman bagi Amerika Serikat pada saat ini adalah Iran. Iran memamerkan kepada dunia senjata pemusnah massal yang membuat Amerika merasa tidak aman. *Ketiga*, membantu

Timur Tengah agar tidak menjadi sarang ataupun pengekspor ekstrimis Islam (Bowman, 2008: 80). Ekstrimisme Islam disini adalah kelompok- kelompok Islam yang berusaha memperjuangkan kembali tegaknya Negara Islam. Hal tersebut membuat Amerika Serikat berusaha melawan ekstrimisme ini. Para kelompok ekstrimisme melakukan kekacauan sehingga mengganggu kepentingan Amerika di Timur Tengah. Selain itu ketakutan Amerika juga bertambah apabila senjata pemusnah massal jatuh ke tangan para kelompok ekstrimis, korban yang berjatuhannya tentunya akan berlipat kali lebih banyak.

Wilayah Timur Tengah merupakan wilayah yang yang strategis. Di samping memiliki kebudayaan masa lampau yang menarik untuk dipelajari, Timur Tengah juga memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Kandungan mineral seperti tembaga, batu bara dan besi menjadi daya tarik bagi negara lain. Aset berharga Timur Tengah bertambah setelah ditemukannya minyak bumi pada tahun 1930-an khususnya di sekitar daerah- daerah teluk (Ruslin, 2013).

Bagi para sekutunya, *Peace Democratic Theory* membawa pandangan yang positif. Menurut mereka, *Peace Democratic Theory* menciptakan perdamaian dengan menyebarkan paham demonstrasi secara menyeluruh ke seluruh dunia. Keyakinan semakin banyak Negara yang demokratis akan membuat semakin aman dunia. Konflik tidak akan terjadi antara Negara demokrasi. Inilah alasan mengapa demokrasi disuarakan ke seluruh dunia. Namun lawan *dari Peace Democratic Theory* ini angkat bicara. Mereka menganggap bahwa teori ini dilebih- lebihkan dan kenyataannya tidak semudah apa yang dikatakan. Lawan dari teori tersebut mengatakan secara kritis klaim dari pendukung yang kemudian menghasilkan perdebatan metodologis. Islam kemudian juga mempunyai berbagai kritik atas penerapan *Peace Democratic Theory* yang merupakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat.

Demokratisasi Timur Tengah sebelumnya dianggap sebagai sebuah ketidakmungkinan karena melihat agama yang dianut oleh negara- negara Timur Tengah, yakni Islam. Islam dan demokrasi dinilai sebagai dua hal yang tidak bisa berjalan seiringan. Berkembangnya pemikiran Islam bahwa pemimpin merupakan kepanjangan tangan dari Tuhan dan yang terpilih menjadi pemimpin merupakan utusan Tuhan menjadikan negara- negara di Timur Tengah memiliki sistem pemerintahan monarki.

Islamisme muncul di Timur Tengah, di mana Islam tidak hanya menjadi agama tetapi juga memasuki ranah politik. Politik Islam menjadikan Islam sebagai ideologi politik dan bukan sekedar agama atau kepercayaan. Dalam konflik Timur Tengah ini Kelompok Reformasi menggunakan Islam untuk menyatukan individu- individu yang biasanya terlibat dalam gerakan Islam kemudian mengintegrasikannya ke dalam sebuah gerakan sosial baru

yang bertujuan untuk membawa perubahan yang demokratis, kebebasan, dan keadilan sosial (Yasmine, 2015). Namun Musim Semi Arab terjadi bukan hanya karena kesamaan agama yang dianut. Namun Arab Spring hanya terjadi karena adanya pemerataan ketimpangan ekonomi dan deprivasi dalam masyarakat.

Lantas bagaimana demokrasi bisa berkembang di negara-negara Muslim dan juga di negara-negara Timur Tengah? Samuel P. Huntington mengatakan bahwa Islam membatasi demokratisasi. Agama dapat menjadi penggerak kehidupan bagi seorang individu. Bagi umat Islam, Islam adalah cara hidup filosofi moral, sistem kepercayaan, atau perintah spiritual. Islam adalah petunjuk paling lengkap bagi pemeluknya. Islam yang dijalankan di Timur Tengah mencakup praktik keagamaan dan kehidupan sosial. (Cook & Stathis, 2012)

Dalam kehidupan negara Islam yang ideal, kegiatan politik harus disetujui oleh Tuhan atau tidak bertentangan dengan perintah-Nya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, agama mengatur segala bentuk kehidupan termasuk kehidupan politik, sehingga seseorang yang menganut Islam harus menganut Islam dalam segala aspek kehidupannya termasuk politik. Dimana keputusan politik tidak dibentuk oleh kehendak otokrasi atau elit politik yang berkuasa tetapi oleh hukum Tuhan Yang mengatur semuanya. Negara dan pemerintah yang mengatur harus memastikan bahwa semua Muslim dapat menjalankan agama mereka dengan benar. Inilah yang disebut negara Islam ideal.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dari itu penulis akan membahas tentang “*bagaimana kritik pemikiran kiri Islam terhadap gagasan Peace Democratic Theory*”?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mengidentifikasi kritik pemikiran Islam dengan *Peace Democratic Theory*.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi strategi Islam dan juga strategi *Peace Democratic Theory* dalam sebuah pertentangan.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

1. Sebagai bahan informasi bagi berbagai pihak terkait alasan adanya pemikiran tentang kritik antara Islam dan *Peace Democratic Theory*.
2. Sebagai bahan informasi bagi berbagai pihak terkait strategi dalam pertentangan antara Islam dan *Peace Democratic Theory*.

#### **E. Studi Pustaka**

Guna menjawab pertanyaan yang telah tercantum dalam rumusan masalah, maka penulis telah mereview tulisan atau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil *literature review* yang telah penulis lakukan:

Manus I. Midlarsky membicarakan tentang sejauh mana demokrasi dan juga Islam berkaitan dengan saling eksklusif yang diuji secara empiris berdasarkan implikasi dalam suatu konflik peradaban serta perdamaian demokrasi. Terdapat tiga hal yang menjadi ukuran demokrasi apabila digunakan, yakni yang pertama indeks demokrasi liberal, ukuran yang berdasar kepada pelebagaan, serta indeks hak politik.

Kemudian variabel seperti variabel lingkungan yang melingkupi batas laut serta juga curah hujan yang ditujukan untuk meminimalkan ancaman eksternal yang akan berakibat pada sistem demokrasi. Penemuan ini dianggap sebagai penemuan yang baik. Hal ini dikerenakan semua aspek baik yang natural maupun tidak natural akan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan proses demokrasi. Variabel lingkungan ini dapat memprediksi lebih baik indeks hak politik yang lebih mendasar. Sedangkan variabel budaya termasuk di dalamnya Islam bergerak ke arah negatif, lebih jelasnya dikaitkan dengan liberal demokrasi. (Midlarsky, 1998)

Kita dapat melihat bahwa demokrasi dan Islam sangat sering dibicarakan di seluruh dunia. Meskipun demokrasi belum sepenuhnya diterima dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah sesuatu yang diterima oleh Islam. Kita dapat menemukan ilustrasi dan moderasi yang dikemukakan bahkan oleh para fundamentalis Islam terkemuka. Rahid al-Ghannusi pemimpin gerakan En-Nahda Muslim yang dilarang keras di Tunisia yang menentang kelompok Rahid al-Ghannusi mengatakan ada kesamaan antara demokrasi dan Islam yang akan menciptakan keharmonisan dalam pelaksanaannya. Tidak hanya berbicara tentang demokrasi dan perdamaian demokratis, Hassan al Turabi pemimpin Front Islam Nasional Sudan juga berbicara tentang pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan demokrasi. Hal

ini tentu saja dianggap tidak biasa karena sebagian masyarakat tidak memahami demokrasi dan keselarasannya dengan Islam. Dalam konteks ini al-Turabi mengatakan Islam dan demokrasi berada dalam keseimbangan(Midlarsky, 1998)

Demokrasi dan *syura* merupakan sebuah persamaan apabila dilihat dari sisi Islam. Kiki Muhammad Hakiki dalam jurnalnya menjelaskan bahwa menolak demokrasi karena merupakan produk barat merupakan sebuah kekeliruan. Menurutnya, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa mencari hikmah dapat ditemukan dari mana saja. Bahkan tidak terkecuali dari Barat, yang dalam artian mayoritas penduduknya bukan beragama Islam(Hakiki, 2016)

Menurut John L. Esposito and James P. Piscatori, terdapat perbedaan yang menjadi perselisihan dalam demokrasi Barat dan tradisi Islam. perdebatan tentang kedaulatan Tuhan yang tidak sama dengan kedaulatan rakyat membuat demokrasi berbeda dengan politik Islam. Kedaulatan Tuhan merupakan kehendak tertinggi dan tidak dapat dipatahkan oleh apapun. Namun, dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, terdapat desakan yang mengharuskan kedaulatan rakyat untuk mengambil peran(Piscatori, 2014).

Perbedaan demokrasi dan *syura* kembali dibahas oleh Muhammad Ichsan. Menurut Ichsan, demokrasi menitikberatkan pada keputusan rakyat yang berarti kedaulatan rakyat. Sedangkan *syura* merupakan sebuah jalan atas kedaulatan Tuhan. Kedaulatan rakyat memiliki kekurangan yakni terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Islam, manusia hanya diberikan amanah untuk dapat menerapkan semua kehendak Tuhan yang telah tertulis lengkap di Al-Qur'an dan Hadits. Maka dari itu, perlu adanya peninjauan ulang terhadap semua keputusan yang diambil oleh kedaulatan rakyat(Ichsan, 2014).

Hassan Hanafi juga mengatakan bahwa penerapan sistem demokrasi dalam Islam sangat tidak dibenarkan. Demokrasi merupakan hasil pemikiran bangsa Barat pada saat masa kegelapan. Para penentang gereja mulai memberontak. Mereka menekankan bahwa kedaulatan Tuhan yang dibawa oleh gereja sangat merugikan semua. Keterkungkungan para rakyat yang tertindas oleh gereja ini kemudian melawan dan mengganti kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat. Mereka mengatakan bahwa kehidupan bernegara dan kehidupan di dunia bukan untuk kehidupan Tuhan. Dalam kehidupan dunia, yang seharusnya memberikan keputusan dan perintah adalah rakyat. Pemikiran yang kemudian mengantarkan adanya kebebasan berfikir, berpendapat, dan berdaulat. Sehingga munculah kelas penguasa dan kelas yang dikuasa(Hanafi, 1992).

Kemudian ada hal-hal yang menyebabkan Islam di masa lalu dipandang tidak demokratis termasuk perdamaian demokratis dalam tinjauan komprehensif wacana politik

Islam kontemporer di mana menurut Choueiri(Choueiri, 1996) “demokrasi sejak awal sangat dikecualikan atau ditoleransi sebagai satu kesatuan. Namun yang salah adalah ada keyakinan fundamentalis yang mengandung keTuhanan yang sejalan dengan doktrin proklamasi menyatakan jihad sebagai rukun Islam keenam kemudian menuntut metode perjuangan bersenjata ditambah dengan penegasan bahwa Islam sebagai sebuah agama pada akhirnya harus dipraktikkan dalam negara totaliter.

Naiwei Chena dan Tsai Chen Yang (2016) menemukan bahwa pemerintah otoriter telah berturut-turut digulingkan dan digantikan oleh rezim demokratis selama beberapa dekade terakhir. Secara khusus negara-negara Muslim yang dianggap tidak demokratis seperti di dunia Arab baru-baru ini meluncurkan serangkaian revolusi demokrasi. Keputusan ini telah menghidupkan kembali semangat demokrasi dan persepsi publik tentang demokrasi di seluruh dunia. Namun mungkin sulit bagi negara-negara Muslim ini untuk berhasil mengembangkan demokrasi jika itu adalah keyakinan utama mereka. Prospek demokrasi mereka sulit, karena negara-negara Muslim ini saat ini sedang berjuang dengan demokratisasi. Dengan demikian studi ini terutama berkontribusi pada literatur yang ada dengan memeriksa apakah Islam menghambat perkembangan demokrasi seperti yang disarankan oleh kebijaksanaan konvensional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih bersifat retrospektif dan berfokus pada tingkat statis demokrasi di negara-negara Muslim, penelitian ini melihat ke masa depan dan mengambil pendekatan dinamis dengan melihat kecepatan demokrasi telah berulang kali diperdebatkan.(Yang, 2016)

Khalil Sardarnia dan Yalda Bahrapour juga menemukan perbedaan dalam pendekatan mereka yang berbeda terhadap demokrasi dan Islam. Mereka menemukan bahwa penilaian global menunjukkan bahwa tidak seperti pendekatan kontras dan pragmatis, pendekatan adaptif lebih protektif. Namun sementara pendekatan ini bukan tanpa kekurangannya kekuatannya lebih besar daripada kekurangannya. Batasan yang paling penting dari pendekatan ini adalah bahwa meskipun keyakinannya pada kompatibilitas antara demokrasi dan Islam dan potensi intelektual dan demokrasi Islam, yang paling penting pendekatan ini belum menarik banyak perhatian pada nuansa dan perbedaan antara Islam dan potensi terkaitnya yakni demokrasi Barat. Lebih jauh lagi sementara kesenjangan antara Islam tradisional, Islam fundamentalis dan demokratis telah diakui sebagai fakta yang jelas kepercayaan yang berlaku adalah bahwa generalisasi radikal dan arus utama ini ke seluruh dunia Muslim di Barat sangat bias dan dapat dilihat sebagai "realitas totaliter". Sebagai

pengakuan atas keserasian antara demokrasi dan Islam para pendukung pendekatan ini menggunakan demokrasi sebagai pemerintahan dan mengacu pada kesesuaian fundamental Islam sebagai Shoura (pertimbangan), Ijma, Ijtihad, dll dengan demokrasi dan mengabaikan perbedaan. Sementara itu berdasarkan realitas dan survei generasi intelektual dan ideologis di Timur Tengah mereka percaya bahwa kehadiran demokrasi yang kompatibel dengan Muslim di Timur Tengah tidak dapat dihindari(Sardarnia & Bahrapour, 2017).

Dalam perkenalannya, demokrasi menekankan pada toleransi, pemilihan umum, konstitusi, dan berbagai hal yang berhubungan dengan kekuasaan rakyat. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, demokrasi hanyalah penerusan praktik tentang pengalaman dan tradisi yang berbau Amerika Serikat dan Eropa Barat. Contohnya adalah pemilihan umum multi partai yang dilaksanakan di Inggris dan Prancis tidak akan berlaku secara universal sebagai sebuah jalan demokrasi yang tunggal. Kemudian apabila kita lihat pelaksanaan dalam demokrasi Islam. Tujuan utama dari demokrasi ini adalah mencapai *syura*. Demokrasi Islam hendaknya tidak perlu merangkul berbagai nilai sekunder yang berasal dari Barat. Demokrasi Islam haruslah bertumpu pada syariat- syariat Islam. Semua keputusannya tidak boleh bertentangan dengan syariat.(Andiko, 2017)

*Peace Democratic Theory* terlihat sangat jelas mempengaruhi politik luar negeri Amerika Serikat. Gagasan *Democratic Peace* menjadikan sebuah pembenaran atas apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara Islam. Afghanistan merupakan sasaran awal serangan Amerika. Hal tersebut dikarenakan Amerika menyebarkan sebuah berita yang menyatakan bahwa Afghanistan merupakan sarang teroris. Isu terorislah yang membuat *Peace Democratic Theory* menjadi sebuah tawaran yang “menarik” bagi negara-negara Islam. Dengan begitu, negara-negara tersebut diiming-imingi dengan perdamaian serta bantuan dari negara besar, khususnya Amerika. Namun pada kenyataannya, negara yang mencoba menerapkan demokrasi sebagai dasar hanya menemui kegagalan dengan kerugian yang lebih besar(Dian Nursita & Surwandono, 2017).

Berdasarkan hasil review terhadap sepuluh penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Islam dan *Peace Democratic Theory*. Yakni adanya ada beberapa hal yang mengungkapkan bahwa Islam dan *Peace Democratic Theory* merupakan dua hal yang akan bertentangan. Beberapa pemikiran tentang perjalanan demokrasi yang terjadi di negara muslim banyak yang mengalami kebuntuan, sehingga demokrasi tidak dapat terlaksanakan atau bahkan gagal.

## F. Kerangka Teori/Konseptual

### Kiri Islam

Seorang Guru Besar Filsafat di Universitas Kairo, Mesir bernama Hassan Hanafi yang lahir pada 13 Februari 1935 di sekitar perkampungan Al-Azhar, Kairo mengeluarkan sebuah pemikiran tentang Kiri Islam yang mana terbilang sangat baru. Pemikiran ini mengantarkan Hassan Hanafi menjadi salah satu tokoh pemikir kritik terhadap Barat.

Hanafi memperdalam filsafat di Universitas Kairo, Mesir. Kondisi Mesir pada saat itu sangat buruk. Pertentangan yang keras antara gerakan revolusi dengan Ikhwan menjadi salah satu penyebab buruknya kondisi Mesir pada saat itu. Pada saat itu, Hanafi memilih untuk berada di pihak Muhammad Najib ketimbang memilih pihak Nasser. Hanafi berpendapat bahwa Najib memiliki visi dan komitmen keislaman yang lebih jelas dari lawannya. Hassan Hanafi juga berkesempatan untuk melanjutkan sekolah ke Perancis. Dari sini Hanafi banyak belajar untuk mencari jawaban dasar atas apa yang terjadi di negaranya.

Waktu-waktu luangnya banyak dihabiskan dengan mengajar di Universitas Kairo dan beberapa Universitas luar negeri. Hanafi juga tidak hanya mengajar, namun juga banyak bertemu dengan para pemikir besar di berbagai negara. Hasilnya, pengalaman hidup Hanafi mengantarkannya menjadi seorang pemikir yang memiliki perhatian besar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara Islam.

Pemikiran Hassan Hanafi ini melahirkan berbagai karya, diantaranya buku yang berjudul *Qadhaya Mu'ashirat fi Fikrina al-Mu'ashir*, *Qadhaya Mu'ashirat fi al-Fikr al-Gharib*, *Al-Turats wa al-Tajdid*, *Al-Istighrab* (Oksidentalisme), *Religious Dialogue and Revolution*, serta *Dirasat al-Islamiyyah*. Namun, tulisan yang paling monumental adalah tulisan tentang Kiri Islam dalam jurnal *al-Yasar al-Islami*

Munculnya sebuah jurnal yang berjudul *al-Yasar al-Islami* yang terbit pada tahun 1981 menjadi awal mula pemikiran “Kiri Islam”. Pemikiran ini dibawa oleh seorang tokoh Kiri Islam yakni Hassan Hanafi (Shimogaki, 1993). Dalam jurnal ini terdapat beberapa gabungan esai yang mana membahas tentang kebangkitan Islam yang didorong dengan adanya pemikiran “Kiri Islam”. Esai pertama dalam jurnal ini berjudul *Maza Ya'ni al-Yasar al-Islami*. Esai ini membahas tentang “tajuk rencana” yang dimaksudkan sebagai awal gerakan pemikiran Hassan Hanafi tentang “Kiri Islam” (Shimogaki, 1993)

Hassan Hanafi mengamati bahwa umat Islam pada saat itu tengah menghadapi setidaknya dua ancaman besar. Dua ancaman ini menurut Hanafi bergerak untuk menuntut

adanya cita-cita tentang kebangkitan Islam. Pemikiran ‘Kiri’ Islam yang gencarkan dalam sebuah proyek besar peradaban yakni *al-Turas wa al-Tajdid* yang kemudian hal ini berdasar pada 3 kekhawatiran yang paling utama. Ketiga kekhawatiran tersebut diantaranya adalah sikap umat terhadap sebuah realitas, sikap terhadap tradisi barat, dan juga sikap terhadap tradisi klasik islam.

Kedua ancaman ini tentunya berasal dari luar dan dalam Islam itu sendiri. Kapitalisme, imperialisme, dan zionisme disebutkan oleh Hanafi sebagai ancaman dari luar islam. Kemudian ancaman dari dalam islam itu sendiri antara lain adalah adanya bentuk penindasan, keterbelakangan, serta juga kemiskinan yang akan menghancurkan islam secara perlahan.

Hanafi mengatakan bahwa kedua ancaman tersebut merupakan hasil dari pola pikir yang dibentuk oleh Barat. Selain itu juga, Hanafi mengatakan bahwa tradisi islam ‘Kanan’ turut serta menciptakan ancaman besar tersebut. Dalam islam ‘Kanan’, Hanafi menyebutkan bahwa islam tidak berada dalam pengertian yang sesungguhnya, yakni tatanan islam yang ada pada saat itu bukan dalam tatanan yang dianggap ideal. Tatanan yang ideal tersebut dikatakan adalah adanya penyerahan diri. Tatanan yang disebutkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dengan Hanafi menyebabkan adanya ‘berkelas’ dalam masyarakat. Dalam hal ini terdapat dua macam kelas yang paling umum. Kedua kelas tersebut terbagi menjadi kelas kanan yakni untuk para penguasa dan kalangan elit, kemudian juga terdapat kelas kiri yakni sebagai kelas yang dikuasai. Akibat dari adanya ‘berkelas’ dalam masyarakat kemudian memunculkan penindas dan yang ditindas. Hanafi menyebut kalangan kelas kanan sebagai *Asy’ariah* dan *Mu’tazilah* sebagai kalangan kelas kiri.

Apabila ditelaah dalam tataran yang bersikap realitas historis, terdapat sebuah sejarah politik yang relevan dengan mode pemikiran Hassan Hanafi, yakni Ali bin Abi Talib dan Husein merupakan golongan kiri, Mu’awiyah dan Yazid diyakini sebagai golongan kanan. Tataran realitas historis ini mengantarkan islam menuju makna ganda. *Pertama*, islam yang di dalamnya terdapat ketundukan yang dikuasai oleh berbagai kekuatan politik yang diatur oleh kelas atas. *Kedua*, dikenal dengan Islam yang bertindak sebagai revolusi yang diatur oleh mayoritas yang tidak berkuasa. Dalam hal ini, keduanya dapat digunakan, dengan catatan sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam suatu wilayah (Hanafi, 1991).

Ditarik sebuah garis besar pemikiran Kiri Islam yang dibawa oleh Hassan Hanafi berdasar pada tiga pilar utama. Ketiga pilar tersebut diantaranya: revitalisasi khazanah klasik dalam islam, islam yang menentang berbagai peradaban yang berasal dari Barat, serta analisis kritis terhadap realitas dunia islam. Langkah-langkah yang diambil Hassan Hanafi yakni dekonstruksi, rekonstruksi, dan juga integrasi. Langkah-langkah tersebut akan lebih baik

apabila dilakukan secara simultan. Dalam hal ini juga, ketiga langkah tersebut diyakini sebagai ijtihad dalam versi yang lebih maju.

Pemikiran yang dikumandangkan oleh Hassan Hanafi ini jelas tidak dapat dimasukkan dalam kategori tradisionalisme, walaupun pemikiran Hanafi ini terdapat hubungan yang erat dengan tradisi yang berada dalam islam. Menurut Hanafi, dia hanya mengambil tradisi tersebut dengan pemikiran yang tidak diambil seluruhnya, melainkan hanya dibongkar saja. Maka dari itu terdapat pendapat bahwa apa yang Hanafi bawa tidak sama dengan pemikiran westernis yang menginginkan adanya pembaharuan yang berdasar pada “kebarat-baratan”, melainkan pemikiran Hanafi sangat jelas menentang berbagai sikap superioritas barat (Shimogaki, 1993).

*Peace Democratic Theory* yang merupakan salah satu Politik Luar Negeri yang digaungkan oleh Amerika Serikat sangat jelas bertentangan dengan pemikiran Kiri Islam yang dibawa oleh Hassan Hanafi. Dalam *Peace Democratic Theory* terdapat sebuah pemikiran yang mendarah daging bahwa sesama negara demokrasi tidak akan terjadi perang, karena apabila perang terjadi maka berbagai kerugian akan muncul. Kerugian itu kan menghancurkan sebuah negara, maka dari itu banyak negara yang mencari aman dengan menggunakan demokrasi ini.

Pemikiran ini tidak jauh dengan apa yang Francis Fukuyama jelaskan dalam artikelnya tentang “The End of History and The Last Man”. Artikel yang dipublikasikan pada saat Musim Panas yang terjadi pada 1989. Fukuyama berpendapat bahwa legitimasi luar biasa dari demokrasi liberal sebagai sebuah sistem pemerintahan yang sangat layak, bahkan juga seakan sebuah consensus yang terjadi di seluruh dunia. Demokrasi dipercaya telah mengalahkan ideologi –ideologi lainnya, seperti komunisme dan juga fasisme. Dengan adanya fenomena tersebut yang kemudian membawa pemikiran Fukuyama bahwa demokrasi liberal merupakan penutup atau sebuah titik akhir dari berbagai evolusi dalam ideologi umat manusia. Bahkan Fukuyama juga mengatakan bahwa demokrasi liberal merupakan satu bentuk paling akhir dari pemerintahan manusia, sehingga Fukuyama menyimpulkannya dengan “Akhir Sejarah”. (Jabpar, 2015)

Apabila kita bandingkan dengan pemikiran Hassan Hanafi yang menjunjung tinggi tradisi klasik islam yakni rasionalisme Mu’tazilah, terdapat sebuah pertentangan yang hebat. Berdasar kepada pemikiran Hassan Hanafi, demokrasi tidak sesuai dengan nilai tradisi islam klasik. Hal ini berasal dari kejadian masa kegelapan yang kemudian mengarahkan para pendobrak kekuasaan gereja untuk bisa lepas dari keterkungkungan gereja. Hasilnya adalah sebuah kesadaran teologis yang dulunya dikuasi oleh Tuhan berubah menjadi kekuasaan manusia. Mereka meyakini bahwa kehidupan dunia bukan untuk kehidupan Tuhan. Maka

dalam kehidupan dunia, manusialah yang harus lebih berkuasa, tanpa melibatkan Tuhan. Hasilnya, pemikiran tersebut kemudian mengubah kesadaran manusia dengan bebasnya berfikir, bebas, berdaulat, untuk eksistensi manusia itu sendiri. Maka dari itu, akan terbentuklah kelas penguasa dan yang dikuasa. Walaupun kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan berarti keadilan dan kesetaraan akan tercapai. Dengan terjadinya kegagalan demokrasi di negara-negara Islam di Timur Tengah menjadi sebuah contoh nyata yang dapat dilihat oleh seluruh manusia di dunia. (Hanafi, 1992)

Dalam hal ini, Hassan Hanafi merangkum pemikiran Kiri Islam dalam tiga kesimpulan. *Pertama*, membatasi budaya Barat pada batas alamiahnya serta menepis ambisi Barat yang ingin menjadi pusat budaya dan standar kemajuan peradaban dunia. *Kedua*, menyadarkan pemikiran Barat dengan cara mengembalikan peradaban dan kebudayaannya serta menekankan bahwa banyak jalan yang dapat ditempuh semua negara di dunia tanpa harus mengikuti budaya Barat. *Ketiga*, Hassan Hanafi menjawab ambisi Barat dengan sebuah ilmu yang dinamakan Oksidentalisme, hal ini bertujuan untuk dapat memerangi Orientalisme yang dibentuk Barat.

### **G. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah, kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis, maka penulis mempunyai hipotesis tentang kritik pemikiran Islam modern terhadap pemikiran *Peace Democratic Theory* adalah:

Kritik pemikiran kiri Islam terhadap gagasan *Peace Democratic Theory* adalah bahwa *Peace Democratic Theory* melahirkan demokrasi yang memapankan politik oligarki.

### **H. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian pada karya tulis ini meliputi faktor apa saja yang mempengaruhi kritik Islam terhadap pemikiran *Peace Democratic Theory*. Mengacu pada jangkauan penulisan tersebut, penulis membatasi rentang waktu penelitian dari tahun 2001 ketika gedung WTC di Amerika Serikat dibom oleh jaringan al-Qaeda yang kemudian membuat Presiden Bush mengeluarkan sebuah doktrin yang dikenal dengan *Bush Doctrin* yang isinya mengenai perang terhadap segala bentuk terorisme di seluruh dunia. Hingga akhir tahun 2010 ketika Amerika Serikat melakukan intervensi militer yang di dalamnya mempunyai berbagai macam dalih, namun sejatinya adalah untuk menyebarkan paham demokrasi kepada negara-negara di Timur Tengah yang sebagian besar warganya beragama Islam. Imbas dari intervensi tersebut adalah pelaksanaan demokrasi yang tidak matang sehingga terjadi kegagalan dalam

melakukan demokratisasi. Maka dari itu, terdapat banyak kritik yang dikeluarkan oleh para pemimpin Islam terhadap kebijakan *Peace Democratic Theory*. Kritik terhadap *Peace Democratic Theory* tersebut kemudian berlangsung sampai saat ini. Sehingga terdapat alasan-alasan mengapa terdapat kritik yang berasal dari Islam kepada *Peace Democratic Theory*.

## **I. Metodologi Penelitian**

Penulis menggunakan metodologi penelitian melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi literatur menganalisa jurnal, karya ilmiah, artikel, dan buku yang berkaitan dengan kritik Islam dan *Peace Democratic Theory*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenal lebih dalam kritik Islam terhadap pemikiran *Peace Democratic Theory*. Fokus dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Mengumpulkan data dari berbagai aspek dan faktor yang melatarbelakangi berbagai kritik Islam terhadap demokrasi.
2. Strategi-strategi yang telah diterapkan oleh Islam untuk mengkritik perkembangan *Peace Democratic Theory* yang mempunyai berbagai hal yang bertentangan pemikiran Islam itu sendiri
3. Faktor-faktor yang menjadi bahan kritik Islam terhadap demokrasi, sehingga dapat dilihat perbedaan antara Islam dan pemikiran *Peace Democratic Theory*.

## **J. Metode Analisis Data**

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Karena sifat data penelitian ini merupakan informasi kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang terucapkan dari para pelaku yang diamati.

## **K. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan penelitian. Kelima bab tersebut yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, pembahasan hasil penelitian, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** merupakan bab yang berisikan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, rumusan masalah, studi pustaka, kerangka teori, hipotesis, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, metode analisis data, sistematika penulisan.

**BAB II** merupakan bab yang akan menjelaskan tentang dinamika demokratisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan membawa politik luar negerinya serta doktrinasi dari para pemimpin Amerika Serikat

**BAB III** merupakan bab yang akan menjelaskan tentang negara Islam yang gagal menjalani proses demokrasi

**BAB IV** merupakan bab yang akan menjelaskan tentang hipotesa mengenai kritik pemikiran Islam modern terhadap politik luar negeri Amerika Serikat yakni *Peace Democratic Theory*.

**BAB V KESIMPULAN**